

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M. (2024). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2023*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ambarwati, & Nurbaeti, A. (2024). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 189–198. <https://doi.org/10.56127/jukim.v3i01.1148>
- Arifianti, S. M., & Imsar. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Sibolga. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(1), 847–852. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i1.208>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzk0IzI=/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan.html>
- Basri, H. H., Karamoy, H., & Mintalangi, S. (2022). Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 247–258.
- Defrian, D., Sururi, A., & Hasanah, B. (2021). Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Samsat di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(2), 163–174. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>
- Guritno, T. 1997. Kamus Ekonomi-bisnis-perbankan : Inggris-Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hakiki, A., Suhaimi, B., Mu'ammam, N., & Kurniasari, D. (2024). Analisis Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Inflasi pada Pertumbuhan Ekonomi. *PRESTISE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 41–63.
- Halomoan, K., & Sitabuana, T. H. (2022). Pajak, Pandemi, dan Masyarakat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Handayani, F., & Usman, B. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Program Pemutihan Pokok Tunggakan serta Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 28(3), 447–463.

<https://doi.org/10.35760/eb.2023.v28i3.8279>

- Herjanti, S., & Teg, I. W. T. (2020). Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 37–48.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(8), 1–21. <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>
- Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaedah, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 93–99. <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4129>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686/1353>
- Kementerian PPN / Kepala Bappenas Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. In <https://jdih.bappenas.go.id> (pp. 1–198).
- Khasanah, K. (2020). *TAX AMNESTY DI INDONESIA Sejarah, Dinamika, dan Analisis Filsafat Hukum Publik Cum Masalahah* (M. Sobirin (ed.); 1st ed.). IERPRO KREASINDO. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42259/6/TAX AMNESTY DI INDONESIA Sejarah%2C Dinamika%2C dan Analisis Filsafat Hukum Publik Cum Masalahah.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42259/6/TAX%20AMNESTY%20DI%20INDONESIA%20Sejarah%2C%20Dinamika%2C%20dan%20Analisis%20Filsafat%20Hukum%20Publik%20Cum%20Masalahah.pdf)
- Kusuma, F. I., Sukristyanto, A., & Hariyoko, Y. (2023). Implementasi Program e-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(5), 76–88. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1298/907>
- Kusumaningtyas, T., & Raziqiin, K. (2023). Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. *Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 120-130. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3142/1494>
- Lala, A. J., Naukoko, A. T., & Dj Siwu, H. F. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Studi Pada Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 61–72.

- Lumansik, A., Natsir, N., & Nuraisyah. (2024). Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3), 377–291. <https://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/419>
- Mahmud, H., & Fajar, H. D. A. (2023). *Perekonomian Indonesia* (M. P. C. E. Dr. H. Mahmud, S.Ag., MM. (ed.)). Yayasan Darul Falah.
- Mahmuda, F. M. (2023). *Pengaruh Pemutihan Pajak, Pembayaran Pajak Secara Online (e-SAMSAT, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75998>
- Meilani, T., Lasmini, L., & Sujaya, F. A. (2024). Peran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Atas Kebijakan Pemutihan Pajak dan Pajak Emisi Karbon di Kabupaten Karawang. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(10), 6464 – 6478. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.2960>
- Meisya, Sandrayati, & Mubarak, M. H. (2024). Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Palembang. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 5(1), 1–8.
- Nasional, P. B. D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Jakarta. <https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>
- Nik Amah, Candra Febrilyantri, & Novi Dwi Lestari. (2023). Insentif Pajak dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- Patria, Y. M. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Program Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah di SAMSAT Kabupaten Tegal. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 273–280. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3586>
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Pub. L. No. 2, 1 (2010). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/49574/Perda Nomor 2 Tahun 2010.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/49574/Perda%20Nomor%202%20Tahun%202010.pdf)
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, Pub. L. No. 20, 3 (2024).
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan

- Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, Pub. L. No. 41, 1 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283183/pergub-prov-nusa-tenggara-timur-no-41-tahun-2>
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, 1 (2020).
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, Pub. L. No. 63, 1 (2019). <https://peraturanpedia.com/provinsi/peraturan-gubernur-nusa-tenggara-timur-nomor-63-tahun-2019/>
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, Pub. L. No. 92, 1 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/320311/Pergub NTT No. 92 Tahun 2022.pdf>
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Keringanan Pokok Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, Pub. L. No. 28, 1 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/263955/pergub-prov-nusa-tenggara-timur-no-28-tahun-2>
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 35, BPK RI 1 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>
- Pratiwi, N. P. A., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*, 24(2), 220–233. <https://doi.org/10.24843/bse.2019.v24.i02.p05>
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84–93. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>
- Purwitasari, A., Mutafarida, B., & Yuliani. (2024). Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 656–666.
- Rahayu, N. S., & Bieattant, L. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kantor SAMSAT Cibinong Bogor

- Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 627–639. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2971%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/viewFile/2971/1418>
- Rahman, A., & Restiatun, R. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Barat. *Sebatik*, 27(2), 699–707. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2370>
- Ratnaningsih, N. M. D. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Dosen dan Tenaga Pendidik di Politeknik elBajo Commodus-Labuan Bajo). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(6), 1–8.
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 84–91. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>
- Rohmah, Z. M., & Biduri, S. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Perspektif Mahasiswa. *Journal of Economic and Economic Policy*, 1(1), 29–48. <https://ijec.antispublisher.com/index.php/IJEC/article/view/8/5>
- Rustam, A., Adiningrat, A. A., Said, S., Nur, M., & Afni, N. (2023). Tax Amnesty Pemberian Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 700–707. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6405>
- Sadewa, V. B. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Samsat Pasuruan. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 2(1), 56–69. <https://doi.org/10.59301/jka.v2i1.35>
- Septiani, F. D. (2023). Krisis Keuangan dan Transformasi Kebijakan APBN: Tantangan dan Strategi Khusus pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2180–2192. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.52756>
- Setyoko, J., Dison, R., & Romadin, A. (2024). Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 56–72. <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i1.146>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi* (T. L. A. A. R (ed.)). Real Property in Australia; Widina Bhakti Persada Bandung. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>

- Statistik, B. P. (2022a). *Berita Resmi Statistik Jumlah Penduduk dan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022* (Vol. 11, Issue 82). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Statistik, B. P. (2022b). *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022* (Issue 51). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>
- Statistik, B. P. (2023). *Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2022* (Issue 08). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2034/gini-ratio-september-2022-tercatat-sebesar-0-381.html>
- Statistik, B. P. (2024). *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit). Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://doi.org/https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis--unit-.html>
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian. [https://repository.umj.ac.id/9338/12/12.BAB III.pdf](https://repository.umj.ac.id/9338/12/12.BAB%20III.pdf)
- Suryani, N., & Hardjono, T. D. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020 di Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 45–54. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2896/1342>
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Tambuala, M. F. H. (2020). *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah)* [Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu]. [http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1154/1/MUH FAISAL h. TAMBUALA.pdf](http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1154/1/MUH_FAISAL_h.TAMBUALA.pdf)
- Uda, M. G. D. (2023). *Analisis Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Nagekeo*. Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Ulfah, A. A., Salsabilah, A., Nasution, A. R., Lubis, S., Panjaitan, T., & Manik, M. (2024). Analisis Kebijakan Peran Pemerintah Dalam Membentuk APBN

dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 26569–26578.

Ulya, H. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal) [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. In *Braz Dent J*. [http://repository.uinsu.ac.id/15607/2/Skripsi Himmatul Ulya Final fix.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/15607/2/Skripsi%20Himmatul%20Ulya%20Final%20fix.pdf)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 1, 3 1 (2022). <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28, 1 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pub. L. No. 11, 6 (2016). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28, 1 (2009). https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 33, BPK RI 1 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>

Utomo, G. P., & Iswara, U. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), 129–143. <http://repository.upnjatim.ac.id/633/>

Yani, I. F., Fiatri, L. A., & Pribadi, J. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di UPP PKB Jakarta Pusat Tahun 2021 - 2022. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 5(2), 10–19. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/4097%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/viewFile/4097/2081>



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114
Jl. Prof Dr. Herman Johanes, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.
Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 0558/WM.H16/SK.CP/2025

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fransiska Devaliana Ngadha
NIM : 33121047
Fakultas/Prodi : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Dosen Pembimbing : 1. Dr. M. E. Perseveranda, SE., M.Si
2. Adiutrix Maria Irayanti Seran, SE., M.Ak
Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMUTIHAN
DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

Skripsi yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **17 (Tujuh Belas) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 26 Juni 2025

Kepala UPT Perpustakaan,



Silvester Suhendra, S.Ptk